

USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

A. BERSIFAT UMUM

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SEMUA UNIT KERJA	Disposisi pimpinan				
2		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya				
3		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan			Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
4		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
5		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
6		Lokasi server	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17J	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
7		Internet Protocol/IP Address Private	UU No.11 Tahun 2008 pasal 30		Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
8		Kode Akses Elektronik	UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16			
9		Sistem Keamanan Elektronik				

10		Bandwidth Management	UU No. 11 tahun 2008	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
11		Sistem Management Database				
12		Laporan keuangan sebelum audit				
13		Arsip Surat Pertanggung jawaban berikut lampirannya				
14		Arsip Dokumen Anggaran dan otorisasinya				
15		Arsip Surat Pencairan Anggaran				
16		Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	- UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i - PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah - PP.No.79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah - Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah - Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan intern pemerintah - Permendagri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan kpde etik pejabat pengawas Pemerintah, Lampiran	Tidak terbatas	Menghambat kebijakan, berpotensi disalahgunakan	
17		Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus		Tidak terbatas	Menghambat kebijakan, berpotensi disalahgunakan	
18		Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus		Tidak terbatas	Menghambat kebijakan, berpotensi disalahgunakan	
19		Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan		Tidak terbatas	Menghambat kebijakan, berpotensi disalahgunakan	

			1 bab Norma Pelaporan huruf a			
20		Informasi hasil rapat pemerintahan (Laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak terbatas	Menghambat kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
21		Surat - surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak terbatas	Menghambat kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
22		Peta Lokasi penyimpanan Arsip				
23		Dokumen proses penentuan juara lomba yang diselenggarakan oleh SKPD				
24		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan				
25		Hasil keputusan Rapat pimpinan				
26		Dokumen Karya intelektual oleh Lembaga/swasta/kelompok/perseorangan				
27		Alat bukti kasus			Menghambat proses penegakan hukum	
28		Dokumen penanganan perkara			Menghambat proses penegakan hukum	
29		Opini hukum			Menghambat proses penegakan hukum	
30		Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final			Menghambat proses penegakan hukum	
31		Kasus Hukum yang masih dalam proses			Menghambat proses penegakan hukum	
32		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
33		Data Elektronik PNS (Database)	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
34		Dokumen/Berkas/Arsip PNS	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

			• UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h			
35		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
36		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
37		Data hasil check up perorangan PNS	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
38		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
39		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
40		Berkas/arsip dokumen PNS masing-masing SKPD	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
41		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	• UUD Tahun 1945 Pasal 28A s.d H • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h • PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000	Sampai pelantikan	Mengganggu, Menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum

42		Dokumen penawaran kontrak barang/jasa				
43		Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa				
44		Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa				
45		Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta				
46		Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sengketa banding				
47		Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan				
48		Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	UU No.30 Tahun 2000 UU No.14 Tahun 2008 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sampai dengan umur konstruksi	Dapat menimbulkan penilaian yang tidak obyektif dan menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
49		Rencana kerja sebelum disahkan				
50		Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	UU No.30 Tahun 2000 UU No.14 Tahun 2008 UU No.2 Tahun 2017	Tidak terbatas	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian
51		Data rencana penempatan PNS/CPNS			Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	
52		Rencana MoU dengan instansi luar negeri				
53		Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat				

B. BERSIFAT KHUSUS

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALI AN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DISHUB	Daftar Salinan Nomor KIR hasil Pengujian Kendaraan Bermotor	Undang-undang nomor.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 53 Ayat 1. Perda no. 25 tahun 2011 Tentang Retribusi Kendaraan Bermotor Draf Perwali Tahun 2020 Tentang Penerapan Kartu Uji Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Perubahan Besaran Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kota Banjarbaru	Selama Berlaku	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan. Berkaitan pada Data-data pribadi . mempunyai akses pada Data penyelidikan tertentu. Misalkan pada kasus yang melibatkan pada pihak berwajib dan membutuhkan akses sangat rahasia.	Dapat melindungi Data Pribadi , menghindari Duplikasi surat-surat KIR secara ilegal, menghindari pungutan liar .